



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Simalungun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.890.038.860.307,00
b. Belanja Daerah	Rp. 2.902.538.860.307,00
Defisit/Surplus	Rp. -12.500.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 20.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 7.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 12.500.000.000,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.890.038.860.307,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah ;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. pajak daerah	Rp. 213.371.544.866,00
b. retribusi daerah	Rp. 6.059.940.466,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 20.880.760.687,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 36.533.965.051,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.568.406.264.237,00 (dua triliun lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. pendapatan transfer
 - pemerintah pusat Rp. 2.494.834.094.000,00
- b. pendapatan transfer
 - antar daerah Rp. 73.572.170.237,00

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.44.786.385.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.902.538.860.307,00 (dua triliun sembilan ratus dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.036.585.230.065,00 (dua triliun tiga puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai Rp.1.304.880.099.463,00
- b. belanja barang dan jasa Rp. 696.467.923.102,00
- c. belanja hibah Rp. 34.684.257.500,00
- d. belanja bantuan sosial Rp. 552.950.000,00

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.343.049.274.976,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar empat puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin Rp. 54.996.925.941,00
- b. belanja modal gedung dan bangunan Rp. 93.772.316.573,00
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 166.854.056.435,00
- d. belanja modal aset tetap lainnya Rp. 27.230.976.027,00

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 502.904.355.266,00 (lima ratus dua miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) adalah :

- belanja Bagi Hasil Rp. 10.971.574.266,00
- belanja bantuan keuangan Rp. 491.932.781.000 ,00

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) adalah Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp -12.500.000.000,00 (defisit dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut tentang APBD dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan.
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-(Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 18

Bupati Simalungun menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 27 Desember 2024.

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 681



KABUPATEN SIMALUNGUN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	276.846.211.070,00
4.1.01	Pajak Daerah	213.371.544.866,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.800.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.807.261.967,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.807.261.967,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.807.261.967,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	44.883.860.872,00
4.1.01.15.01	PBBP2	44.883.860.872,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	44.883.860.872,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28.667.683.620,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	28.667.683.620,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	28.667.683.620,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	57.371.061.059,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	3.000.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	43.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	43.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	10.800.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	10.800.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	271.061.059,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	271.061.059,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	300.000.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	300.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	39.889.461.084,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20.01	Opsen PKB	39.889.461.084,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	39.889.461.084,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	32.951.216.264,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	32.951.216.264,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	32.951.216.264,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.059.940.466,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.797.713.228,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	68.630.205,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	68.630.205,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	113.557.500,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	113.557.500,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	648.900.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	648.900.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	481.493.113,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	481.493.113,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	485.132.410,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	469.580.716,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.551.694,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.662.227.238,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	242.351.333,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	242.351.333,00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	23.163.913,00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	23.163.913,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.000.000.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.000.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	396.711.992,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	396.711.992,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.600.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	600.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	600.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.880.760.687,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20.880.760.687,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	20.880.760.687,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	20.880.760.687,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.533.965.051,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	113.868.314,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	40.797.065,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	40.797.065,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	73.071.249,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	73.071.249,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.033.208.750,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.033.208.750,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1.033.208.750,00
4.1.04.05	Jasa Giro	11.417.521.764,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.146.917.450,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.146.917.450,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.075.120.029,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.075.120.029,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	481.871,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	481.871,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.195.002.414,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.195.002.414,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	9.367.100.283,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.367.100.283,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.367.100.283,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	94.265.940,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	94.265.940,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	94.265.940,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.000.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.000.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.000.000,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.000.000,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.000.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.000.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.000.000,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	1.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	14.500.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	14.500.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	14.500.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.568.406.264.237,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.494.834.094.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	332.760.518.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	332.760.518.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	332.760.518.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	74.648.958.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	64.523.323.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	46.339.381.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	17.100.011.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.083.931.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	4.803.949.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	12.184.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	117.026.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.673.871.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	167.063.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	5.321.686.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	5.321.686.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.523.479.289.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.229.679.273.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	1.229.679.273.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	293.800.016.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	62.260.088.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	133.730.639.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	60.644.477.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	31.764.812.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	563.945.329.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	172.416.381.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	25.623.290.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.110.000.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	12.176.737.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	15.685.592.000,00
4.2.01.09.01.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.140.000.000,00
4.2.01.09.01.0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	15.000.000.000,00
4.2.01.09.01.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	6.837.805.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	260.045.000,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	226.120.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	19.244.258.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	34.673.563.000,00
4.2.01.09.01.0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	25.516.671.000,00
4.2.01.09.01.0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	7.922.300.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	391.528.948.000,00
4.2.01.09.02.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.09.02.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.225.000.000,00
4.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	4.790.499.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	113.274.760.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.733.750.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.104.600.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	347.700.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.345.427.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	32.031.428.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	197.801.894.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	6.269.000.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	13.544.890.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.572.170.237,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	73.572.170.237,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.572.170.237,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.125.525.223,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.038.829.725,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	47.407.815.289,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.786.385.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	44.786.385.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	44.786.385.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	44.786.385.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	44.786.385.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.890.038.860.307,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.036.585.230.065,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.304.880.099.463,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	960.803.059.633,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	739.507.827.284,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	404.820.177.411,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	334.687.649.873,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.452.847.741,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.920.321.165,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.532.526.576,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.975.287.249,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.975.287.249,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	54.734.090.684,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.480.787.531,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28.253.303.153,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.800.509.498,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.404.848.749,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.395.660.749,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	41.419.977.318,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.924.135.787,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.495.841.531,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.390.959.100,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.390.959.100,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.978.219,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.122.568,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.855.651,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	45.222.865.111,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	30.069.921.714,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	15.152.943.397,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.783.714.234,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.021.227.690,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	762.486.544,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.318.854.597,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3.031.411.153,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	2.287.443.444,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.167.148.598,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.167.148.598,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	316.505.904.412,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	105.408.517.036,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	105.408.517.036,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	211.097.387.376,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	90.000.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	240.363.098,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.683.144.783,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.075.038.136,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.966.930.426,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	997.236.527,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	823.780.406,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	197.801.894.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	6.269.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.470.321.181,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.408.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.408.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	157.670.100,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	157.670.100,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	66.868.200,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	66.868.200,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	536.961.528,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	536.961.528,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.235.151.953,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	124.395.348,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	46.700.329,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	58.376.276,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.005.680.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.395.040.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.395.040.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	248.814.237,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	126.165.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	126.165.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.801.900,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.801.900,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.235.362,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.235.362,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.695.546,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.695.546,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.009,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.009,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.540.156,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.540.156,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.467.923.102,00
5.1.02.01	Belanja Barang	169.495.669.807,58
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	169.488.930.107,58
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	671.288.500,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.478.649.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	905.404.900,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.109.619.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	550.800,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	180.030.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	537.500.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	302.392.500,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	812.786.701,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	154.281.815,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.259.901.548,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.841.060.135,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.511.626.408,43
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	128.951.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.489.949.474,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.219.547.286,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.212.770.166,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	432.658.900,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.003.675.800,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.232.936.686,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	14.899.268.917,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.728.254.485,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	40.210.691.801,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	29.040.904.712,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.517.536.585,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	188.274.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.484.530.988,15

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.860.950.100,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.739.840.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.657.089.600,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	172.588.100,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	700.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	589.412.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	631.803.500,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	206.500.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	3.892.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	132.200.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	33.400.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	31.212.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.739.700,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.739.700,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	301.679.851.762,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	162.190.363.043,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.999.930.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.028.370.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	357.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.421.980.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	7.600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	180.000.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	120.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	80.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	541.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.080.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	46.605.558.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	491.210.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	240.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	35.284.690.408,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.019.116.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.427.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	162.700.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	216.000.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	360.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	33.600.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.991.600.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	449.166.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	943.820.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	917.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	320.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	101.826.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	19.360.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	604.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	88.007.147,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.043.427.074,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	30.260.041.454,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	528.709.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.082.584.960,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	8.670.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	77.970.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	938.090.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.127.257.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	330.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	83.020.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	418.160.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	89.361.069.691,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.471.790.432,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	60.312.770.508,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.608.983.242,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.865.543.280,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.986.623.509,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.115.358.720,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	64.217.108,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	64.217.108,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.425.551.702,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	277.688.850,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.830.015.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	902.240.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	80.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.728.933.500,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.053.766.692,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.074.297.660,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	56.000.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	362.610.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	896.200.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	524.600.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	261.600.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	50.000.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	60.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	17.040.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	15.000.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	2.040.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.725.462.018,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	9.950.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.656.804.619,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	171.600.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	900.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.708.800.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.010.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	1.500.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	253.700.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.352.451.679,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.726.318.720,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	960.837.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.175.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	923.715.000,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	13.250.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	290.465.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	420.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	200.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	145.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	72.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	73.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.931.233.200,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	17.931.233.200,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	55.387.984.881,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.045.655.000,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	88.126.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	97.931.000,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	92.319.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	56.540.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.056.410.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	742.200.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	885.280.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	764.899.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	93.400.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	216.990.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	617.830.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	850.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	296.000.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	132.730.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	45.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.040.806.163,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.605.148.901,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	120.000.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.000.000.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.460.000.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	6.495.914.750,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	1.297.542.512,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	62.200.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.301.523.718,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	17.650.024.238,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.997.379.480,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	296.120.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	8.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	95.121.110.471,42
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	95.121.110.471,42
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.714.121.866,34
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.572.750.605,08
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.925.574.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	908.664.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.207.330.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.773.080.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	818.280.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	30.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.924.800.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.434.250.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.434.250.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	54.075.976.180,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	54.075.976.180,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	50.342.226.180,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	3.733.750.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.500.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.500.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	34.684.257.500,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.010.209.500,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.625.350.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.512.300.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	113.050.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.250.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.250.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.134.859.500,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.134.859.500,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	20.767.100.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	20.767.100.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	20.767.100.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.906.948.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.906.948.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.906.948.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	552.950.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	502.950.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	502.950.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	502.950.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	10.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	10.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	10.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	40.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	40.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	40.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	343.049.274.976,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.996.925.941,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.265.709.200,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.563.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	2.563.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.263.146.200,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.185.658.000,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	4.855.200,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	72.633.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.783.742.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.783.742.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.214.738.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	569.004.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.536.600,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	10.536.600,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	10.536.600,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.823.933.720,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.309.506.220,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	18.303.900,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.291.202.320,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.625.037.300,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	13.428.719.650,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	26.749.400,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	672.202.700,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	63.948.900,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.377.316.650,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	56.100.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	889.390.200,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	22.032.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	26.112.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	13.209.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.752.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	820.285.200,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	95.228.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	17.328.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.528.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	8.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.800.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	77.900.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	75.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	2.900.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.279.273.317,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.453.735.017,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.493.490.008,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	375.300,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	906.515.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	87.728.450,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	283.544.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	405.001.080,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	209.493.060,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	67.588.119,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.000.000.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.825.538.300,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.825.538.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	672.067.180,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	122.567.180,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	3.621.000,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	58.453.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	6.915.600,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	53.577.580,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	500.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	500.000.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	49.500.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	49.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.875.067.524,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.111.115.294,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	20.150.208,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.596.481.086,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.494.484.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	763.952.230,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	203.388.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	33.554.030,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	527.010.200,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.114.788.600,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	1.114.788.600,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	1.114.788.600,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	90.000.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	90.000.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	90.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	34.170.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	30.600.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	30.600.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	3.570.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	3.570.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	1.193.400,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.193.400,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	1.193.400,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	182.027.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	182.027.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	182.027.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	763.677.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	763.677.500,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	752.457.500,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	11.220.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	15.005.511.900,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	15.005.511.900,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	15.005.511.900,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.772.316.573,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	93.772.316.573,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.772.316.573,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.253.040.180,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.278.771.052,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	58.063.327.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	11.883.318.532,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	3.534.964.857,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.323.895.872,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	35.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	199.999.080,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	166.854.056.435,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	131.436.333.989,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	129.436.333.989,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	124.744.936.200,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	3.800.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	891.397.789,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.000.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.000.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	30.096.190.446,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	24.401.597.978,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	24.401.597.978,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.694.592.468,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	5.694.592.468,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.289.852.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.342.500.000,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	3.342.500.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.779.512.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.779.512.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	167.840.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	167.840.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	31.680.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	31.680.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	31.680.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.230.976.027,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	59.582.107,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	59.582.107,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	31.720.821,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	10.721.268,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	17.140.018,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	11.472.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	6.372.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	6.372.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	5.100.000,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	5.100.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	27.159.921.920,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	27.159.921.920,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	27.159.921.920,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	195.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	195.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	195.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	195.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	502.904.355.266,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.971.574.266,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.971.574.266,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.971.574.266,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.971.574.266,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	491.932.781.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	491.932.781.000,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	159.172.263.000,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	159.172.263.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	332.760.518.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	332.760.518.000,00
	Jumlah Belanja	2.902.538.860.307,00
	Total Surplus/(Defisit)	-12.500.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	20.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	20.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	20.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	12.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00